

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asikin, Amiruddin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama., Bandung
- Manan, Bagir dalam Budiman NPD.2005, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*.
UII press. Yogyakarta
- Manan, Bagir, 1999, *Dasar Dan Dimensi Politik Otonomi dan UU No.22 Tahun 1999*, Makalah., Bandung
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1990, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2005, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia.*, Sinar Harapan, Jakarta.
- S.F. Marbun dan Moh.Mahfud, 2000, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty. Yogyakarta
- Slamet, Ina E. 1963. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bharatara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press., Jakarta.

S. Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*. edisi ke empat, Liberty, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

T.Sumarnonugroho, 1984, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT.Hanindita., Yogyakarta.

Twikromo, Y. Argo, 1999, *Gelandangan Yogyakarta suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Van Der Tak Dalam Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirosardjono, Soetjipto, 1988, *Gelandangan dan Pilihan Kebijaksanaan Penanggulangan*, LP3E, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014.)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 82 Tahun 2011)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. (Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177 Tahun 1980)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Tahun 2010)
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
- Peraturan Daerah D.I Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis. (Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial, (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008).
- Keputusan Walikota Yogyakarta No. 616/KEP/2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

C. Jurnal

B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

Gede Sedana., M.sc.MMA, Jurnal Tentang Faktor penyebab terjadinya Gelandangan Dan Pengemis, *studi kasus* Kota Denpasar, Gianyar, Tabanan Singaraja, Bali. 2007

Djarmiko Anom, "*Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Jurnal konstitusi P3K HAM UNS Volume I. No.1, 2008, hlm.35

D. Internet

Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta, *D.I Yogyakarta Dalam angka 2014*, hlm 172. http://yogyakarta.bps.go.id/index.php?r=arc/view_flipbook&id=30#/172. diakses pada 20 Maret 2015 pukul 23.00 WIB.

Republika Online "*Selama Januari 91 Gepeng Yogya terjaring Razia*" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/27/niu2fk-selama-januari-91-gepeng-yogya-terjaring-razia> diakses pada 21 Maret 2015 pukul 06.00 WIB.

"*Tentang Pa Van der Steur*" Yayasan Pa van der Steur Indonesia <http://pavdsteur-orphanage.orgfree.com/tentangkami.php> diakses pada 13 April 2015 pukul 22.15 WIB

"*Sejarah taspen*" Pembentukan Program tabungan hari Tua ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1963 tentang Pembelian Pegawai negeri bn Pegawai Negeri. http://www.taspen.com/?page_id=28 diakses pada 25 April 2015 Pukul 23.56 WIB

Bapak Drs Untung Sukaryadi, MM (24 September 2014) 2015 jogja bebas gepeng, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/2015-jogja-bebas-gepeng/>, diakses 19 Oktober 2015, Pukul 02.00 WIB